

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkembang pesat banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah di dalam suatu masyarakat hukum. Satuan terkecil dalam tatanan pemerintahan Indonesia adalah desa, yang dipimpin oleh kepala desa yang memiliki peran besar dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pemerintahannya. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tatanan pemerintahannya, dimana semua akhir dari kegiatan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, (Kemendagri.go.id)

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*) (Rivan, 2019).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Namun, hasil survei BPKP pada tahun 2014, menunjukkan bahwa pengetahuan perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa. Salah

satu informasi anggaran APBDes dapat dilihat pada Sistem Keuangan Desa yaitu dengan melalui aplikasi (SISKEUDES), (Mufti Arief Firmansyah 2020).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Selain gratis, SISKEUDES juga memiliki banyak kelebihan. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan mudah digunakan. Sistem Keuangan Desa merupakan pendukung utama dalam transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat terkait anggaran yang diterima, (Bpkp.go.id).

Fenomena yang terjadi dalam implementasi SISKEUDES, yaitu belum optimalnya pengoperasian SISKEUDES untuk pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap akuntansi desa, tata kelola keuangannya yang belum baik, tingkat kepedulian masyarakat yang kurang terkait pengelolaan keuangan, dan Keterbukaan terhadap masyarakat yang tidak transparan mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat menimbulkan *fraud*, pelaporan harus dibuat semudah mungkin agar tidak mempersulit proses pelaporan yang diharapkan mampu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, itulah yang akan membentuk tata kelola yang baik dalam sebuah pengelolaan keuangan desa, (Desa Curugreja, 2022).

Sebelum SISKEUDES diluncurkan, Sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi APBDesa dan laporan keuangan desa. Selain itu, ada ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang didapatkan dari developer swasta, yang tidak diperbarui untuk memenuhi regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. SISKEUDES dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi SISKEUDES telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly,

dan desktop aplikasi serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan *good village governance* dalam pengelolaan keuangan desa, (Bpkp.go.id).

Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016 ketika mulai diterapkan tentu saja pengaplikasiannya menemui banyak kendala dan bagaimana persiapan pemerintah desa dalam penggunaan aplikasi itu sendiri. Penerapan aplikasi ini di mulai pada tahun 2018, meskipun sudah mengoperasikan Siskeudes yang diberikan oleh pemerintah tetapi masih kurangnya keterlibatan SDM selaku perangkat desa yang belum sepenuhnya dapat menjalankan aplikasi yang sudah dijalankan dan pengelolaan dana desa yang belum dikelola secara optimal, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, (Igat Sulina 2018).

Kabupaten Subang adalah kabupaten yang terdiri dari 30 kecamatan salah satunya kecamatan Sukasari, di kecamatan Sukasari terdapat 5 desa, dimana semua desa yang ada di kecamatan Sukasari telah mengimplementasikan SISKEUDES, salah satunya adalah desa Curugreja. Desa Curugreja telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2017 termasuk desa pertama yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa di kecamatan Sukasari. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata Kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good village governance*) sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Desa Curugreja merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, diketahui bahwa Kecamatan Sukasari adalah kecamatan dengan prioritas pertama dalam penanggulangan kemiskinan. Kecamatan Sukasari memiliki 5 desa dengan perolehan dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tertinggi Desa Curureja yaitu Rp291.110.407. Aparatur desa merupakan komponen yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Selama ini masih terdapat persoalan internal yang dialami desa terutama aparatnya yang masih kurang percaya diri untuk mengelola potensi ekonomi desa dan sumber-sumber keuangannya sehingga berdampak terhadap kemampuan desa untuk berkembang secara alamiah dan dengan otonomi yang dimilikinya kurang berkembang secara maksimal.

Implementasi sistem keuangan desa diperlukan guna mewujudkan (*good village governance*) dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Lukito, 2018). Sebagai salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi, bahwa penerapan sistem dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut: kompetensi sumber daya manusia, partisipasi pemakai, dukungan top manajemen, ukuran organisasi, formalisasi pengembangan SIA, program pelatihan dan pendidikan serta penggunaan SIA untuk melakukan penyesuaian terhadap penerapan sistem keuangan desa diperlukan partisipasi pengguna sistem, dan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem (*usability system*), (Latrini, 2018).

Implementasi sistem keuangan desa artinya aparat desa sudah menerapkan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa (*siskeudes*) ditujukan kepada aparat pemerintahan desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai

dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban, (Trisna & Wahyuni, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh, (Fajar & Eko, 2018) Implementasi aplikasi siskeudes yang diterapkan sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dari tahapan pertama yaitu pra Perencanaan. Dimana tahapan tersebut telah diselenggarakan dengan baik dengan diadakannya sosialisasi terkait dengan tata cara penggunaan sistem. Tahapan kedua ialah mematangkan proses perencanaan yang berkaitan dengan siskeudes dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan harapan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik untuk menunjang proses penerapan siskeudes kedalam kegiatan pengelolaan keuangan. dan mulai menyusun pengelolaan keuangan melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Selaras dengan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, (Juardi, 2018) juga memaparkan bahwa penerapan Siskeudes sangat signifikan dalam tata kelola penggunaannya. Baik dari proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan dari aparat desa sendiri dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sulindawati, 2018) menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa merasa puas dengan pengimplementasian Siskeudes yang dapat menimbulkan efektivitas pelaporan dana desa yang menjadi lebih cepat.

Berdasarkan penelitian, (Damayanti & Pardani, 2017) Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang wajib diterapkan secara online oleh aparatur pemerintah desa maka sangat diperlukan partisipasi yang cukup tinggi antara sekretaris, kaur keuangan, dan staf operator desa untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mampu menciptakan efektivitas dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Penelitian yang berkaitan dengan kompetensi aparatur pemerintah desa dilakukan oleh, (Nintyari, 2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan Siskeudes.

Dalam penggunaan Siskeudes, kompetensi merupakan salah satu elemen terpenting dalam mengurus keuangan pemerintah desa yang didukung dengan kemampuan dibidang akuntansi. Penelitian yang dilakukan, (Utami, 2016) menunjukkan bahwa kemampuan pengguna sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Bahwa dengan kemampuan yang tinggi akan mencapai kinerja yang tinggi dalam sistem tanpa terjadinya pemborosan waktu.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang)**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengoperasian aplikasi SISKEUDES
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap akuntansi desa
3. Tata kelola keuangannya yang belum baik
4. Tingkat kepedulian masyarakat yang kurang terkait pengelolaan keuangan
5. Keterbukaan terhadap masyarakat yang tidak transparan mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat menimbulkan *fraud*

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan menyesuaikan permasalahan yang ditemukan dilapangan.

1. Variabel dalam penelitian ini berfokus pada implelementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Curugreja, Kabupaten Subang

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengimplementasi aplikasi (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan sistem yang diperlukan instansi atau perusahaan.

b. Bagi Instansi/perusahaan

Dapat dijadikan sebagai pemikiran kepada semua pihak, dan perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai masukan atau pertimbangan

untuk mendukung pembuat keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, informasi dan perbandingan untuk pihak-pihak yang membutuhkan penulisan dan penelitian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa.

